

# PKB, KEGAGALAN PELEMBAGAAN *SHARED VALUES* DAN DAMPAKNYA

## *PKB, THE FAILURE OF SHARED VALUES INSTITUTIONALIZATION AND ITS IMPACTS*

**Dr. Firman Noor, MA (Hons)**

Peneliti Pusat Penelitian Politik, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia  
Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 10, Jakarta  
*E-mail: firman.noor@yahoo.co.id*

Diterima: 6 Agustus 2015; direvisi: 11 September 2015; disetujui: 20 Oktober 2015

### ***Abstract***

*The failure of PKB to institutionalize shared values has provided deep impact of its existence. The presence of vague or indistinct values and party less commitment to establish shared values as working ideology and collective identity are factors behind such a failure. Moreover, the massive role of outsiders in assisting party to create and socialize shared values also becomes the thing that confuses the value infusion process. There are three impacts of the absent of shared values in PKB namely, the establishment of internal factions or grouping based on the spirit of pragmatism, the growth of loyalty dedicated to the figures rather than the party itself which over time overshadows cadres' loyalty to the party and the appearance of different or gradation in understanding party's ideology. Those three impacts eventually have become reason behind catastrophic condition that ruins party's internal solidity.*

**Keywords:** *PKB, political party, institutionalization.*

### **Abstrak**

Kegagalan PKB dalam melembagakan *shared values* memiliki dampak yang serius bagi keberadaan partai ini. Kegagalan ini disebabkan oleh beberapa hal, yakni hadirnya *shared values* yang terlalu umum dan lemahnya komitmen membangun *shared values* yang dapat dijadikan *working ideology* dan identitas kolektif. Selain itu, peran serta lembaga lain di luar partai dalam proses pembentukan dan penyebaran *shared values* justru cenderung mengacaukan proses ini. Ada tiga dampak dari lemahnya keberadaan *shared values* dalam PKB, terciptanya faksi-faksi atau pengelompokan atas dasar pragmatisme, tumbuhnya loyalitas kepada tokoh dan bukan partai, dan munculnya gradasi pemahaman atas ideologi. Ketiga hal itulah yang pada akhirnya menjadi penyebab bagi sulit terbangunnya soliditas dalam partai ini.

**Kata Kunci:** Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), partai politik, pelembagaan.

### **Pendahuluan**

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) adalah satu di antara partai yang paling dinamis dalam konstelasi politik era reformasi. Partai ini diprediksi akan tumbuh kuat dan solid serta akan muncul menjadi kekuatan politik yang disegani. Dalam dua kali pemilu di awal reformasi partai

ini terbukti mampu menjelma menjadi partai dengan jumlah pemilih terbesar ketiga, setelah Golkar dan PDIP. Selain itu, K.H Abdurrahman Wahid (Gus Dur) salah satu deklarator partai pun terpilih menjadi presiden pertama di era reformasi.

Namun demikian, dalam perkembangannya, prediksi tersebut tidaklah seutuhnya terjadi. Belum genap tiga tahun berdiri, PKB tidak saja mengalami konflik internal, namun juga perpecahan yang berujung pada munculnya kepengurusan kembar. Sejarah kemudian mencatat bahwa tidak ada partai di Indonesia yang mengalami perpecahan dan melahirkan kepengurusan kembar sebanyak partai ini. Begitu juga tidak ada satupun partai yang menyelenggarakan muktamar atau kongres nasional hingga tujuh kali dalam periode sepuluh tahun keberadaannya. Perpecahan seolah menjadi bagian tak terpisahkan dalam partai ini.

Berangkat dari fenomena tersebut, tulisan ini bermaksud menganalisis mengapa partai kalangan Nahdliyin ini memiliki potensi perpecahan yang demikian tinggi. Untuk kepentingan tersebut tulisan ini mencoba menawarkan jawaban dengan mengaitkan fenomena itu dengan kondisi internal partai yang jauh dari ideal, dimana kondisi yang jauh dari ideal itu sendiri diasumsikan adalah sebagai efek dari lemahnya pelembagaan partai.

Berdasarkan asumsi sedemikian, tulisan ini akan mengkaji situasi pelembagaan yang ada dalam PKB. Meski demikian, tulisan ini tidak bermaksud menelaah keseluruhan dimensi yang menentukan kuat atau lemahnya pelembagaan. Tulisan ini hanya akan menelaah satu dimensi saja yakni, pelembagaan nilai-nilai bersama (*shared values*) atau umum secara teoritis dikenal sebagai *value infusion*. Hal ini tidak dimaksudkan untuk mengecilkan dimensi yang lain, namun lebih karena keterbatasan penulis. Selain itu, kajian mengenai *shared values* termasuk yang paling prinsipil tidak saja dalam melihat dampak pelembagaan dalam sebuah partai, namun pula dalam memahami hakekat partai itu secara hampir keseluruhan.

Dalam pada itu, kajian mengenai PKB telah dilakukan oleh banyak pihak, mencakup banyak aspek dari partai ini. Berbagai kajian itu, telah dengan baik memotret kondisi internal partai<sup>1</sup>. Namun kajian-kajian yang melandaskan

diri pada perpektif pelembagaan masih belum banyak. Padahal kondisi pelembagaan partai tidak dapat dikesampingkan manakala kita akan membahas situasi internal sebuah partai politik. Studi Randall dan Svasand<sup>2</sup> mengindikasikan peran penting kondisi pelembagaan dalam memahami kehidupan internal partai politik. Kajian mereka mengisyaratkan sejumlah keunggulan, di antaranya adalah cukup dapat menangkap apa yang sebenarnya terjadi di balik peristiwa-peristiwa penting dalam sebuah partai. Persoalan konflik internal PKB, misalnya, tidak hanya dilihat dalam soal bagaimana konflik itu berlangsung, namun apa yang menyebabkan potensi konflik itu eksis dan belakangan demikian mudah tersulut.

Sehubungan dengan tujuan penulisan di atas ada tiga hal yang akan dikaji dalam tulisan ini. (1) eksistensi (potensi) *shared values* yang ada dalam PKB, (2) kondisi infusi *shared values* dalam partai ini, dan (3), dampak yang ditimbulkan dari kondisi nilai-nilai bersama itu bagi soliditas PKB. Adapun periode pembahasan akan difokuskan pada periode 1998-2008, atau dekade awal reformasi, dimana soliditas partai demikian cair yang kemudian menimbulkan dampak yang kompleks bagi PKB.

### **Kerangka Konseptual**

Pelembagaan partai (*party institutionalisation*) telah menjadi sebuah perspektif yang kembali bangkit dalam beberapa dekade terakhir ini dalam ilmu politik, terutama dalam membahas kondisi internal partai-partai, dengan tidak harus terkait dengan sistem kepartaian. Kajian Maurice Duverger<sup>3</sup>, misalnya, dipandang sebagai kajian pembuka bagi kehadiran perspektif pelembagaan ini. Beberapa kajian dengan perspektif pelembagaan kemudian bermunculan<sup>4</sup>, membawa beberapa dimensi

---

*Harapan*, (Jakarta: Panitia Nasional Harlah Ke-9 PKB, 2007).

<sup>2</sup> Vicky Randall dan Lars Svasand, "Party Institutionalization in New Democracies", *Party Politics*, Vol. 8 January/1/2002.

<sup>3</sup> Maurice Duverger, *Political Parties: Their Organisation and Activity in the Modern State*, (London: Methuen, 1964).

<sup>4</sup> Robert Michels, *Political Parties: A Sociological Study of the Oligarchical Tendencies of Modern Democracy*, (New York: The Free Press, 1966); Samuel P. Huntington, *Political Order in Changing Society*, (New Haven: Yale University Press,

---

<sup>1</sup> Kamarudin, *Konflik Internal PKB*, (Depok: Akses Publishing, 2008); A. Effendy Choirie, *PKB Politik Jalan Tengah NU*, (Jakarta: Pustaka Ciganjur, 2002); A. Effendy Choirie, *Islam-Nasionalisme UMNO-PKB Studi Komparasi dan Diplomasi*, (Jakarta: Pensil-234, 2008); Yenny Zannuba Wahid, A. Effendy Choirie, M. Kholid Syeirazi, (Eds), *9 Tahun PKB Kritik dan*

dan aspek baru dalam kajian pelebagaan partai ini.

### 1. Infusi Nilai-Nilai Bersama sebagai Dimensi Pelebagaan

Perlu disampaikan bahwa dalam perpektif pelebagaan partai, dimensi infusi nilai-nilai termasuk dalam aspek khusus. Ada dua aspek lain dalam teori-teori pelebagaan partai yang bersifat “non-nilai-nilai” yang umum diketahui. *Pertama*, aspek internal, yang terutama berhubungan dengan keberadaan dan kedudukan prosedur atau aturan main partai. Biasanya para teoretisi pelebagaan membahas aspek ini dengan mengaitkannya pada soal seberapa besar tingkat konsistensi partai dalam melaksanakan regulasi internal, eksistensi manajemen konflik, rekrutmen dan kaderisasi yang sistematis. Partai yang terlembaga, dengan demikian, adalah partai yang konsisten menerapkan aturan main dan memiliki kelengkapan untuk melaksanakan aturan main itu.

*Kedua*, aspek eksternal. Dalam aspek ini titik fokus kajiannya adalah mengevaluasi pola hubungan antara partai politik dengan elemen-elemen yang melingkupi dan mempengaruhi kehidupannya. Aspek eksternal ini melihat sejauhmana kemampuan sebuah partai untuk bertahan dalam sebuah sistem politik. Secara spesifik, aspek eksternal ini mencakup hal seperti kemandirian dalam pengambilan keputusan, kemampuan beradaptasi dan pengembangan hubungan yang mapan dengan masyarakat berdasarkan identitas bersama (*reification*), dan keberlanjutan berpartisipasi dalam pemilu.

Aspek nilai-nilai, di sisi lain, tidak dapat dimasukkan dalam kedua aspek di atas. Dapat

diartikan sebagai aspek ketiga yang terkait dengan soal-soal yang bersifat substansial, yang berkenaan dengan upaya-upaya menegakkan dan memantapkan nilai-nilai bersama, melalui infusi nilai (*value infusion*) di sebuah partai. Berbeda dengan aspek-aspek “non-nilai” yang terlihat bersifat prosedural dan “teknis”, aspek ini menekankan arti penting hal-hal seperti, norma, keyakinan atau ideologi, nilai-nilai bersama, *platform*, kebiasaan, tradisi, figur atau bahkan romantisme atas kejayaan masa lalu<sup>5</sup>. Levitsky mengatakan bahwa persoalan bagaimana nilai-nilai itu ditransformasikan dan memunculkan rasa hormat, bahkan ketergantungan, kader dan pendukung terhadap partai merupakan indikasi dari terlembaganya partai. Di sini, partai telah pada level atau status “bernilai karena keberadaannya” (*valued for itself*) di mata para anggotanya<sup>6</sup>. Dalam tulisan ini, dengan demikian eksistensi PKB akan dilihat dalam konteks eksistensi nilai-nilai dan bagaimana nilai-nilai itu ditransformasikan dan berperan dalam memberikan identitas kolektif.<sup>7</sup>

### 2. Dampak atas Hilangnya Shared Values

Keberadaan seperangkat *shared values* dapat berdampak positif terhadap partai. Hal ini terutama berperan sebagai sesuatu yang memotivasi kader untuk dapat bergerak tanpa berharap imbalan-imbalan material. Dengan kata lain, keberadaannya dapat menumbuhkan idealisme atau pemantapan nilai-nilai, yang pada akhirnya dapat memelihara komitmen kader untuk terus menjaga keberlangsungan hidup dan jati diri partai. Tidak selamanya sebuah partai yang mampu menjalankan rutinitas manajerial dapat menjamin keberlangsungan hidup partai sebagaimana yang diharapkan<sup>8</sup>.

Selain itu, adanya nilai-nilai bersama yang ditanamkan dan berkembang dalam sebuah

---

1968); Kenneth Janda, *Political Parties: A Cross National Survey*, (New York: The Free Press, 1980); Angelo Panebianco, *Political Parties: Organization and Power*, (Cambridge: Cambridge University Press, 1988); James W. McGuire, *Peronism without Peron. Unions, Parties and Democracy in Argentina*, (Stanford: Stanford University Press, 1997); Steven Levitsky “Institutionalisation and Peronism: the Case, the Concept and Case for Unpacking the Concept”, *Party Politics*, Vol.4, No.1, 1998; Vicky Randall dan Lars Svasand, “Party Institutionalization in New Democracies”, *Party Politics*, Vol. 8 January/1/2002; Mathias Basedau dan Alexander Stroh, “Measuring Party Institutionalization in Developing Countries: A New Research Instrument Applied to 28 African Political Parties”, *GIGA Working Papers*, (Hamburg: GIGA Research Program, 2008).

---

<sup>5</sup> Steven Levitsky, “Institutionalisation and Peronism: the Case, the Concept and Case for Unpacking the Concept,” *Party Politics*, Vol. 4, No. 1, hlm. 77-92.

<sup>6</sup> *Ibid.*, hlm. 82.

<sup>7</sup> Deliar Noer, “Ideologi, Politik dan Pembangunan”, (Jakarta: Yayasan Perkhidmatan 1983) dalam Kamarudin, *Partai Politik Islam di Pentas Reformasi. Refleksi Pemilu 1999 untuk Pemilu 2004*, hlm. 50.

<sup>8</sup> Levitsky, *op.cit.*

partai mampu menciptakan identitas kolektif di setiap kadernya. Di sini, arti penting partai tidak saja terkait dengan upaya menjaga tujuan-tujuan politiknya, melainkan telah pada posisi sangat pribadi dimana partai menurut Selznick sudah menjadi “pemuas kebutuhan personal”<sup>9</sup>. Partai telah mewakili keyakinan asasi para anggotanya dan menjelma menjadi “*the ‘receptacle’ of group idealism*” (“wadah dari idealisme kelompok”).<sup>10</sup>

Lebih dari itu, nilai-nilai bersama itu dapat pula menjadi petunjuk (*guidance*) atas sebuah standard perilaku yang dikehendaki. Menurut McGuire, infusi nilai-nilai memiliki peran fundamental pada upaya partai meningkatkan kemampuan organisasi untuk membentuk dan memaksakan tingkah laku (yang dapat diterima) pada sebuah periode waktu yang lama<sup>11</sup>. Keberadaan komitmen ini juga mendorong kader memperbaiki perilakunya menurut nilai-nilai ini,<sup>12</sup> dengan kata lain menjadi *code of conduct*.

Keberadaan *shared values* untuk jangka waktu yang panjang secara teoritis menjadi suatu hal yang turut mendorong soliditas partai.<sup>13</sup> Di sisi lain, ketiadaan atau lemahnya peran *shared values* cenderung akan memberikan peluang kepada tiap anggota partai untuk dapat bertindak secara bebas sesuai dengan kepentingan masing-masing. Keadaan ini berpotensi menyuburkan sikap inkonsistensi, perilaku pragmatis atas dasar kepentingan diri sendiri, dan terciptanya perselisihan yang sulit dikompromikan. Dengan kata lain, lemahnya soliditas partai dan lemahnya pelembagaan akan nilai-nilai bersama di sebuah partai adalah sesuatu yang tidak dapat dipisahkan.

## PKB Selayang Pandang

Keberadaan PKB secara normatif terkait erat dengan upaya mengembalikan kedudukan

NU dalam kancah politik nasional, disamping menjadi saluran bagi ide-ide dan kepentingan kalangan santri tradisional yang selama ini tenggelam. Kedudukan ini membuat PKB merupakan simbol kebangkitan bagi politik NU, meski dalam prakteknya ada pula kalangan NU yang mendirikan partai lain atau menjadi anggota partai lain. Meski demikian, kalangan santri tradisional dan ulama menyadari, sebagaimana yang akan dijelaskan nanti, bahwa peran yang dimainkannya melebihi sekadar memperjuangkan kepentingan kalangan santri tradisional. Ini menjadi salah satu alasan dibalik dipilihnya kata “Bangsa” dan bukan “Ulama” atau “Ummat”.

Upaya menghadirkan sebuah partai yang menaungi kepentingan NU ini telah datang tidak lama setelah reformasi bergulir. Kalangan NU dari seluruh penjuru Indonesia, terutama di Jawa, mendorong Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) untuk membentuk partai yang dapat menyalurkan aspirasi mereka. Usulan yang masuk ke PBNU sangat beragam, ada yang hanya mengusulkan agar PBNU membentuk parpol, ada yang mengusulkan nama parpol, lambang parpol, bentuk hubungan dengan NU, ada yang mengusulkan visi dan misi parpol, AD/ART parpol, nama-nama untuk menjadi pengurus parpol, ada juga yang mengusulkan semuanya. Di antara yang usulannya paling lengkap adalah Lajnah Sebelas Rembang yang diketuai KH M Cholil Bisri dan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Barat.

Dalam menyikapi usulan yang masuk dari masyarakat PBNU menanggapi secara hati-hati. Hal ini didasarkan pada adanya kebijakan khittah yang menetapkan bahwa secara organisatoris NU tidak terkait dengan partai politik manapun dan tidak melakukan kegiatan politik praktis. K.H Abdurrahman Wahid, sebagai Ketua Tanfidziah PBNU sendiri pada awalnya menolak jika PBNU harus berurusan dengan pembuatan partai. Namun dalam perkembangannya PBNU tidak dapat mengelak dari keinginan masyarakat NU yang bersemangat untuk membuat partai. PBNU akhirnya mengambil jalan tengah yakni, bersedia untuk mendirikan partai tanpa harus menjadi partai. Atas dasar kepentingan seperti itulah PBNU mengadakan Rapat Harian Syuriyah dan

<sup>9</sup> Philip Selznick, *Leadership in Administration: A Sociological Interpretation*, (New York: Row, Peterson and Company, 1957), hlm. 17.

<sup>10</sup> *Ibid.*, hlm. 22.

<sup>11</sup> James W. McGuire, *Peronism without Peron. Unions, Parties and Democracy in Argentina*, (Stanford: Stanford University Press, 1997), hlm. 8.

<sup>12</sup> *Ibid.*, hlm. 8.

<sup>13</sup> Randall dan Svasand, *op.cit.*, hlm. 13.

Tanfidziyah PBNU tanggal 3 Juni 1998 yang menghasilkan keputusan untuk membentuk Tim Lima yang diberi tugas untuk memenuhi aspirasi pendirian partai. PBNU kemudian membentuk Tim Asistensi yang bertugas membantu Tim Lima<sup>14</sup>.

Setelah Tim Lima dan Tim Asistensi menyelesaikan tugasnya PBNU memutuskan hari pendeklarasian partai. Pada tanggal 23 Juli 1998, bertempat di kediaman Gus Dur, PKB dideklarasikan oleh lima orang tokoh NU yakni, K.H. Munasir Ali, K.H. Ilyas Ruhiyat, K.H. Muchid Muzadi, K.H. Abdul Mustofa Bisri dan K.H. Abdurahman Wahid. Deklarasi ini dihadiri oleh ribuan santri NU. Hadir pula politisi, agamawan, cendekiawan, diplomat dan tokoh-tokoh nasional yang bersimpati dengan konsep perjuangan PKB. Beberapa kalangan merespons positif kehadiran partai ini dan beberapa diantaranya memprediksikan bahwa PKB akan memainkan peran penting pada Pemilu 1999 dan percaturan politik nasional.

Proses kelahiran partai ini memperlihatkan bagaimana PKB menjadi satu-satunya partai yang difasilitasi oleh NU. Meski PBNU menjaga agar NU tidak terikat dengan PKB, pertumbuhan PKB di daerah-daerah banyak pula disokong oleh pengurus NU di daerah. Dalam perkembangannya, peran NU tidak saja bersifat seremonial dan administratif, namun pula dalam hal yang bersifat esensial, seperti nilai-nilai bersama, pemikiran, dan budaya politik. Masa pendirian partai dan kampanye merupakan era ketika nilai-nilai bersama itu marak digembargemborkan. Pada situasi semacam itulah kesadaran sebagai kelompok Nahdliyin yang berideologikan *Ahlus Sunnah wal Jamaah* (Aswaja) dengan tradisi pesantren yang kuat

---

<sup>14</sup> Tugas kedua tim ini secara prinsip adalah dalam menginventarisasi dan merangkum usulan yang ingin membentuk parpol baru, dan membantu warga NU dalam melahirkan parpol baru yang dapat mewadahi aspirasi politik warga NU. Pada tanggal 22 Juni 1998 Tim Lima dan Tim Asistensi mengadakan rapat untuk mendefinisikan dan mengelaborasi tugas-tugasnya. Tanggal 26 - 28 Juni 1998 Tim Lima dan Tim Asistensi mengadakan konsinyering di Villa La Citra Cipanas untuk menyusun rancangan awal pembentukan parpol. Pertemuan ini menghasilkan lima rancangan: Pokok-pokok Pikiran NU Mengenai Reformasi Politik, Mabda<sup>7</sup> Siyasiy, Hubungan Partai Politik dengan NU, AD/ART dan Naskah Deklarasi.

berikut pemahaman dan peran kebangsaannya coba untuk didengung-dengungkan.

Namun upaya itu tidak berlangsung lama dan berkelanjutan. Khofifah Indar Parawansa membenarkan situasi ini dengan menyatakan bahwa kesadaran tentang *shared values* itu ada pada masa pembentukan partai dan kampanye untuk kemudian menghilang<sup>15</sup>. Hal mana terlihat kemudian dengan munculnya fenomena konflik internal yang berlangsung secara beruntun. Pada tahun 2001 PKB terpecah menjadi PKB-Kuningan dan PKB-Batu Tulis. Sekitar empat tahun kemudian muncul kepengurusan kembar yakni PKB-Alwi dengan PKB-Gus Dur. Menjelang Pemilu 2008, konflik kembali melanda yang berujung pada munculnya kepengurusan PKB-Ancol dan PKB-Parung. Berbagai peristiwa itu memancing berbagai spekulasi atas kemunculan fragmentasi yang nampak nyaris tiada hentinya itu.

Pada masa-masa berikutnya, khususnya pasca wafatnya Gus Dur, upaya untuk mendekati kepada warga Nahdliyin dengan menawarkan ideologi Aswaja dan spirit kebangsaan ini mulai dikedepankan lagi<sup>16</sup>. Situasi ini terkait dengan upaya untuk kembali menyatukan elemen-elemen NU dan PKB yang telah tercerai berai pascakonflik berkepanjangan, dalam rangka menjaga eksistensi PKB yang berpotensi terancam hilang pada Pemilu 2014 jika elemen-elemen partai itu tidak mau juga bersatu. Hal ini kembali membuktikan tesis bahwa kesadaran untuk menumbuhkan semangat Aswaja sebagai *shared values* muncul pada masa-masa khas terutama dalam rangka membangun sebuah barisan. Kerja-kerja untuk membangun kembali *shared values* dan upaya untuk mengimplementasikannya secara lebih konsisten belakangan nampak mulai membawa hasil.

---

<sup>15</sup> Wawancara dengan Khofifah Indar Parawansa, Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan (1999-2001), Ketua Lembaga Pemenangan Pemilu DPP PKB (2002-2005), di Jakarta, 20 Oktober 2010.

<sup>16</sup> Wawancara dengan Ahmad Shodiq Noor, Sekretaris Jenderal DPW PKB DKI Jakarta, di Jakarta, 3 November 2010.

## **Shared Values dalam PKB: Sintesa Aswaja, Supremasi Kyai dan Kebangsaan**

Bagian ini membahas shared values dalam PKB. Pembahasan di bawah memperlihatkan bahwa *shared values* yang dimiliki PKB pada dasarnya masih bersifat potensi ketimbang manifes.

Sebagai partai yang didirikan oleh warga NU dan difasilitasi oleh PBNU, PKB tidak dapat melepaskan dari tradisi dan nilai-nilai ke-NU-an. Sejauh ini ada beberapa nilai yang mengikat kaum Nahdliyin pada khususnya dan kader PKB pada umumnya, yang berangkat dari tradisi Islam Tradisional yakni (1) paham Aswaja, (2), tradisi kepatuhan santri atas kyai (supremasi kyai) dan (3), nilai-nilai kebangsaan, termasuk di dalamnya penghormatan terhadap pluralisme dan demokrasi menjadi nilai-nilai yang dikembangkan dalam partai ini<sup>17</sup>. Ketiga hal itulah merupakan norma-norma yang berpotensi berperan menjadi *shared values* dan juga *shared values* yang mengikat secara naluriah orang-orang NU pada umumnya.

Ketiga nilai itu pulalah yang kemudian dirangkum dan coba dikembangkan oleh para pendiri PKB di awal pendiriannya. Hasil dari rangkuman nilai-nilai itu menurut Kacung Marijan, salah seorang penyusun ideologi PKB versi Rembang, merupakan sebuah sintesa yang termaktub dalam ideologi “kebangsaan dalam semangat Islam Aswaja”, atau “nilai-nilai keAswajaan dalam semangat kebangsaan”<sup>18</sup>. Dua nilai pokok yang ditopang oleh tradisi pesantren ini merupakan sokoguru yang tidak dapat dilepaskan dalam ideologi politik yang diyakini oleh para warga NU.

Namun demikian, “ideologi PKB” dengan ketiga nilai yang ada dalam tubuh NU itu tidak serta merta dapat ditegakkan dengan mudah. Dalam konteks internal, yang seharusnya dapat

mengatur kesamaan pandang dan tingkah laku, nilai-nilai ini seolah menjadi hambar. Ada semacam *missing link* manakala nilai-nilai, yang demikian tumbuh dan berkembang dalam NU itu, masuk dalam dunia politik, yang menyebabkan nilai-nilai itu tidak saja mengalami gradasi, namun cenderung terabaikan.

### **1. Paham Aswaja**

Menurut HA Thoyfer MC, seorang politisi NU, paham Aswaja mengatur kegiatan kalangan Nahdliyin tidak saja dalam konteks individu namun pula berorganisasi<sup>19</sup>. Nilai-nilai itu sendiri dilembagakan dalam tradisi NU dan dilaksanakan dengan baik. Hal ini terlihat secara jelas dalam agenda perjuangan organisasi yang menempatkan perjuangan penegakan Aswaja sebagai salah satu alasan utama (*raison de etre*) berdirinya NU<sup>20</sup>.

Namun demikian kesibukan para *mujtahid Aswaja* atau aparatus ideologi dalam memberikan rel berpolitik PKB cenderung melupakan kerja-kerja penafsiran yang mengarah pada pembentukan kedisiplinan dan loyalitas kader dalam lingkup internal. Dalam prakteknya nilai Aswaja ini lebih difokuskan pada posisinya sebagai pembimbing pilihan kebijakan (*policy domain*). Namun sebagai sebuah identitas yang mengikat (*identity domain*) persoalan itu dianggap telah selesai *taken for granted* tanpa ada sebuah upaya sistematis menjadikannya sebagai tuntunan perilaku berorganisasi.

Situasi ini menyebabkan paham ini belum menjadi nilai yang dilembagakan dan menentukan pembentukan *code of conduct* dalam PKB. Hal ini tidak saja menyebabkan munculnya berbagai penafsiran mengenai ideologi Aswaja, namun juga berpotensi menyebabkan masuknya paham atau nilai-nilai lain dalam kehidupan berpolitik orang NU dan kader PKB. Keterbengkalaiannya inilah yang menurut Khamami Zada menyebabkan banyaknya kader PKB di era reformasi yang

<sup>17</sup> Tentang pemahaman Aswaja lihat H. Munawir Abdul Fattah, *Tradisi Orang-Orang NU*, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2008). Tentang Tradisi Pesantren lihat Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren: Studi Tentang Pandangan Hidup Kyai*, (Jakarta: LP3ES, 1982); Kacung, Marijan *Quo Vadis NU: NU setelah Khittah 1926*, (Surabaya: Penerbit Erlangga, 1992). Tentang Paham Kebangsaan lihat A. Effendy, Choirie, *Islam-Nasionalisme UMNO-PKB Studi Komparasi dan Diplomasi*, (Jakarta: Pensil-234, 2008).

<sup>18</sup> Wawancara dengan Prof. Dr. Kacung Marijan, Pengamat Politik NU dan Anggota Tim Asistensi Pendirian PKB versi Rembang, di Jakarta 26 November 2010.

<sup>19</sup> HA Thoyfer MC, *Politik Kebangsaan NU. Tafsir Khittah Nahdlatul Ulama 1926*, (Yogyakarta: Mutiara, 2010), hlm. 92-93.

<sup>20</sup> Mengenai Aswaja sebagai agenda utama NU lihat Choirul Anam, *Pertumbuhan dan Perkembangan NU*, (Surabaya: Duta Aksara Mulia, 2010); Kacung Marijan, *Quo Vadis NU: NU setelah Khittah 1926*, (Surabaya: Penerbit Erlangga, 1992); Greg Fealy, *Ijtihad Politik Ulama: Sejarah NU 1952-1967*, (Yogyakarta: LKiS, 2003).

dengan mudahnya memutuskan loncat pagar dan masuk dalam pangkuan organisasi lain, terutama dalam menyalurkan aspirasi politiknya<sup>21</sup>.

Lebih dari itu, upaya pengembangan penafsiran atas nilai yang belum komprehensif menyebabkan ideologi Aswaja tidak mendapat warna yang substantif di PKB, dan masih cenderung lebih menjadi identitas ke-NU-an. Oleh karena itu, secara umum PKB dalam hal ini dapat dikatakan belum mampu membangun sebuah *shared values* yang khas dirinya yang kemudian dapat diimplementasikan dalam konteks internal partai secara baik. Ketergantungan ideologis (*ideological dependency*) semacam ini memperlihatkan sebuah sisi negatif dari “fenomena *copy paste*” NU, baik secara organisatoris maupun ideologis<sup>22</sup>, dalam tubuh partai yang didirikannya sendiri.

## 2. Supremasi Kyai

Pada soal nilai ketaatan santri kepada kyai merupakan sebuah potensi *shared values* di antara warga NU juga menunjukkan gejala problematik yang sama. Sebenarnya dalam lingkup nonpolitik nilai ini nyaris bersifat absolut, dan dalam konteks sosial keagamaan telah menjadi karakter yang memberikan identitas khusus bagi NU. Peran menonjol kyai, yang dalam bahasa Dhofier adalah “raja kecil”<sup>23</sup>, telah ada dalam komunitas ini bahkan jauh sebelum jamiya terbentuk. Situasi ini terus dilestarikan, dan terjadi dengan sendirinya mengingat peran kyai dalam kehidupan santri mulai dalam persoalan membangun masyarakat dan negara hingga menyentuh persoalan paling privat dalam kehidupannya<sup>24</sup>. Tidak mengherankan jika kyai

bagi sementara pengamat merupakan penuntun tingkah laku para santri.

Alasan supremasi kyai ini pulalah yang mendorong NU keluar dari Masyumi di tahun 1952<sup>25</sup> dan mendorong pendukung PKB untuk bersedia berkorban jiwa raga membela Gus Dur, Sang Guru-Wali, yang tengah menghadapi *impeachment* di tahun 2001. Dalam AD/ART PKB refleksi dari nilai ini adalah dengan menempatkan para kyai dalam Dewan Syariah yang merupakan *the real leader* dalam organisasi itu. Sedangkan Dewan Tanfidz, yang diisi para putra kyai dan santri pada umumnya, hanyalah merupakan pelaksana dari kebijakan yang telah digariskannya.

Namun demikian, kondisi tradisi di atas cenderung menjadi relatif dalam dunia politik. Naluri komunitas NU mengandalkan tradisi supremasi kyai, yang salah satunya berintikan aspek ketaatan, tidak terjaga dengan baik dalam konteks politik dan kekuasaan. Dalam dunia politik pola tersebut cenderung menjadi relatif, kabur dan bahkan berantakan. Dalam lingkaran elite, beberapa fenomena dalam tubuh NU dan juga pada akhirnya PKB, menunjukkan pola bagaimana kelompok santri kerap melakukan penyeimbangan peran bahkan perlawanan terhadap kehendak dan aspirasi kyai, yang tercermin dari konflik antara Dewan Syuro (representasi kyai) dan Dewan Tanfidz (representasi santri).

Peran dan kedudukan Dr. Idham Cholid, Ketua Dewan Tanfidz terlama dalam sejarah NU (1952-1984), *vis a vis* Dewan Syariah yang ulang kali menyebabkan pergesekan diantara ke dua badan itu dan belakangan menciptakan faksionalisasi dalam tubuh NU yakni “Kelompok Cipasung” dan “Kelompok Situbodo”, menjadi contoh simbolik situasi ini. Kondisi ini disimpulkan dengan baik oleh Mahrus Irsyam dengan menyebutnya sebagai sebuah fenomena “simbiosis mutualisme”<sup>26</sup>. Pola hubungan yang disebabkan persaingan kyai dan santri ini memunculkan fenomena

<sup>21</sup> Khamami Zada, “NU, Politik dan Khidmat Umat”, *Kompas*, 15 Desember 2006.

<sup>22</sup> A. Effendy Choirie, “Menjadikan PKB Partai Nasional dan Terbuka”, dalam Yenny Zannuba Wahid, A. Effendy Choirie, M. Kholid Syeirazi, (Eds), *9 Tahun PKB Kritik dan Harapan*, (Jakarta: Panitia Nasional Harlah Ke-9 PKB, 2007), hlm. 189-190. Lihat juga A. Effendy, *Islam-Nasionalisme UMNO-PKB Studi Komparasi dan Diplomasi*, (Jakarta: Pensil-234, 2008).

<sup>23</sup> Dhofier, *Tradisi Pesantren: Studi Tentang Pandangan Hidup Kyai*, (Jakarta: LP3ES, 1982), hlm.58.

<sup>24</sup> Wawancara dengan Anas Nashikin, Sekertaris Jenderal Garda Bangsa, di Jakarta, 26 Oktober 2010. Lihat juga *Ibid*, hlm. 57-60.

<sup>25</sup> Lihat Greg Fealy, *Ijtihad Politik Ulama: Sejarah NU 1952-1967*, (Yogyakarta: LKiS, 2003); Yusril Ihza Mahendra, *Modernisme dan Fundamentalisme dalam Politik Islam, Perbandingan Partai Masyumi (Indonesia) dan Partai Jamaat-i-Islami (Pakistan)*, (Jakarta: Paramadina, 1999).

<sup>26</sup> Mahrus Irsyam, *Ulama dan Partai Politik. Upaya Mengatasi Krisis*, (Jakarta: Yayasan Perkhidmatan, 1984), hlm. 166.

persaingan vertikal diantara keduanya, yang biasanya diredakan jika kemudian bisa saling menguntungkan. Fenomena semacam ini menunjukkan tidak berlakunya pola *patron-client* dalam tubuh komunitas NU manakala memasuki atau menyentuh wilayah politik<sup>27</sup>.

Di sisi lain, tradisi ketaatan ini pun tidak berjalan dengan mulus pada level akar rumput. Fenomena berpikir dan berkehendak bebas ini dalam batas-batas tertentu merasuki ranah dunia pesantren dan memiliki implikasi yang cukup rumit, terutama dalam konteks politik. Situasi ini sejalan dengan berkembangnya masyarakat ke arah yang semakin individualistik dan independen. Beberapa fenomena kegagalan PKB dalam memenangkan hati warga NU dalam pilkada, meski telah “mengunci” kyai berpengaruh di sebuah wilayah, membuktikan adanya gradasi pandangan masyarakat terhadap peran kyai sebagai “juru arah aspirasi”. Situasi inilah yang kemudian dipahami sebagai munculnya fenomena masyarakat pragmatis atau masyarakat yang semakin “rasional”<sup>28</sup>.

Fenomena di atas memperlihatkan adanya sebuah persoalan besar, baik pada level elit (hubungan Dewan Syariah dan Dewan Tanfidziyah) dan akar rumput (hubungan kyai dan santri serta masyarakat sekitar), dalam upaya pemantapan tradisi supremasi kyai ini di dalam konteks politik. Yang dapat disimpulkan bahwa tradisi supremasi kyai nampak tidak terlalu kokoh dalam dunia politik.

Dalam situasi seperti itulah NU mewariskan salah satu *shared values*-nya yang potensial itu kepada PKB. Sayangnya partai tidak menerimanya secara kritis, dengan menengok sejarah dan gejala kontemporer yang ada. Nilai tersebut cenderung dianggap statis dan diterima apa adanya, dengan harapan kepatuhan itu akan ada dengan sendirinya. Penerimaan pasif itu tercermin dari kurangnya komitmen membenahi pola hubungan kyai-santri dalam ranah politik

<sup>27</sup> *Ibid.*, hlm. 7-8.

<sup>28</sup> Wawancara dengan Ali Masykur Musa, Wakil Ketua Umum Dewan Tanfidz PKB (2005-2010) dan Ketua Umum Dewan Tanfidz PKB-Versi Parung (2008-2009), di Jakarta 19 Oktober 2010. Lihat juga sikap kritis santri Dr. Faisal Ismail, MA, “Pilihan Politik Kiai dan Daya Kritis Jamaah NU”, dalam Dr. Faisal Ismail, MA, *NU, Gusdurisme dan Politik Kiai*, (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogyakarta, 1999), hlm. 27-34.

yang problematik itu. Kondisi inilah yang menyebabkan potensi *shared values* dalam diri tradisi patronase itu tidak berkembang dengan lebih baik, ataupun mampu dijadikan sebagai penjaga disiplin perilaku para kader partai.

### 3. Komitmen Kebangsaan

Komitmen kebangsaan sebenarnya merupakan *shared values* yang berkembang dalam tubuh NU begitu pula dalam PKB. Kesadaran kebangsaan ini merupakan salah satu ciri khas keduanya yang diakui banyak kalangan. Dalam soal paham kebangsaan, nilai-nilai keagamaan NU yang sarat dengan ajaran seperti *tawassuth* (moderat), *tawazun* (seimbang), *tasamuh* (toleransi), dan fleksibel mampu membuat dirinya beradaptasi dan menjadi garda terdepan bagi pembelaan dan penguatan nilai-nilai keindonesiaan<sup>29</sup>, bahkan sejak bangsa ini belum berdiri hingga di era Reformasi<sup>30</sup>. Nilai-nilai semacam ini telah menjadi pengikat warga NU, mengingat praktek keagamaan yang sarat dengan pergumulan nilai-nilai lokal setempat dan keislaman. Dalam perkembangannya, nilai-nilai ini diperbaharui dengan lebih kontekstual lagi oleh Gus Dur.

Namun demikian pengembangan ide kebangsaan dalam ranah keagamaan sebagaimana di atas tidaklah dimiliki oleh NU atau juga PKB semata. Hampir semua ormas dan orpol yang berbasis komunitas Islam mengakui hubungan tak terpisahkan antara agama dan kebangsaan. Bahkan PKS yang tumbuh dalam ragam pemikiran neo-reivalisme, juga semakin menunjukkan perilaku kebangsaannya. Situasi ini menyebabkan dalam titik tertentu muncul semacam “relativisme identitas” yang pada akhirnya turut menopang kebebasan berpihak dan bertingkah laku bagi warga NU dalam menjalankan dan menyalurkan aspirasi kebangsaannya itu. Oleh karena itu, muncul pemikiran bahwa kebangsaan versi NU atau PKB dalam prakteknya dapat diterapkan pada banyak

<sup>29</sup> Ali Masykur Musa, “Politik NU dan Pragmatisme Parpol”, dalam Khamami Zada dan A. Fawaid Sjadzili, *Nahdlatul Ulama, Dinamika Ideologi dan Politik Kenegaraan*, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2010), hlm. 71-72.

<sup>30</sup> Pembahasan mengenai keterkaitan Aswaja dengan paham kebangsaan lihat misalnya Eimar Martahan Sitompul, *NU dan Pancasila*, (Yogyakarta: LKiS, 2010).

aktivitas dan organisasi, yang tidak mesti harus di PKB. Dalam masa krisis keyakinan seperti ini mudah sekali menyebabkan seorang kader “pindah ke lain hati”.

Dalam “mengantisipasi” situasi ini PKB sebagai sebuah partai berupaya mencari kekhasan kebangsaannya dengan mengedepankan perspektif Gus Dur, yang dalam perspektif Greg Barton dirangkum dalam terminologi “neo-modernisme Islam”<sup>31</sup>. Namun situasi ini tidak terlampaui berhasil. Tidak saja karena pandangan Gus Dur tetap saja dapat dijalankan dalam ruang dan forum atau organisasi lain, artinya tidak harus di PKB, namun juga uniknya mendapatkan kritik dari dalam. Bagi beberapa kalangan konservatif, paham kebangsaan Gus Dur dianggap “terlalu jauh melangkah” dari kerangka Aswaja, sebagaimana yang akan dibahas kemudian. Disini relativisme identitas menjadi kontinum beriringan dengan resistensi yang muncul dari dalam. Akibatnya, meski paham kebangsaan berpotensi besar menjadi nilai bersama, dan dalam prakteknya memang telah berjalan, namun sekali lagi tidak saja paham ini menjadi demikian relatif tapi tidak pula mampu menjadi sesuatu hal yang mengikat dan mengatur tingkah laku para nahdyyin dalam konteks berpartai.

Tiga persoalan yakni kecenderungan penafsiran ideologi *ahlul sunnah waljamaah* yang berorientasi keluar, kecenderungan tradisi supremasi kyai yang kabur dalam dunia politik dan paham kebangsaan yang relatif inilah yang menyebabkan partai ini belum memiliki modal nilai-nilai yang maksimal untuk dapat dikembangkan oleh para pendukung untuk menciptakan soliditas internal partai. Meskipun nilai-nilai tersebut tetap berpotensi menyatukan kader dan menjadi identitas ke-NU-an, namun pertumbuhannya sebagai sesuatu yang benar-benar mengikat dalam konteks ke-PKB-an hingga satu dekade keberadaannya menjadi relatif lemah.

Kekaburan ideologis ini tercermin dari sikap partai yang kerap berubah-ubah dalam menunjukkan eksistensi dirinya. Muncullah

---

<sup>31</sup> Greg Barton, *Gagasan Islam Liberal di Indonesia. Pemikiran Neo-Modernisme Nurhulis Madjid, Djohan Effendi, Ahmad Wahib dan Abdurrahman Wahid*, (Jakarta: Paramadina, 1999).

kemudian berbagai istilah yang diklaim oleh partai ini seperti “partai terbuka”, “partainya orang NU”, “partai hijau”, “partai advokasi”. Hal yang kemudian membuat kuatnya aroma relativisme nilai dari partai ini. Kalangan pengamat pun dibuat menjadi tidak seragam dalam menempatkan partai ini. Ada yang memposisikan partai ini sebagai partai kebangsaan, partai Islam tradisional, partai Islam-Kebangsaan, partai Islam malah ada yang menuduhnya sebagai partai sekular.

Situasi *shared values* sebagaimana yang digambarkan di atas menjadi persoalan mendasar yang menyebabkan pelembagaannya menjadi tidak berkembang. Dapat dimengerti jika kekacauan di PKB demikian besar, karena tidak saja pelembagaan itu yang tidak berjalan, sebagaimana yang akan dibahas pada bagian selanjutnya, namun juga karena apa yang seharusnya menjadi *shared values* itu sendiri masih bersifat potensi atau tidak sepenuhnya eksis.

### **Kondisi Pelembagaan *Shared Values* di PKB: Sebuah Kegagalan**

Dalam perjalanan sejarah PKB, upaya-upaya melembagakan partai itu ada. Namun sayangnya tidak selalu berhasil dengan baik. Pada bagian ini akan disampaikan upaya-upaya tersebut, termasuk elemen pelaksana dan berbagai kendala yang dihadapi.

#### **1. Upaya-Upaya Melembagakan *Shared Values***

Implementasi ideologi Aswaja, tradisi pesantren dengan semangat kebangsaan cukup terasakan, terutama dalam konteks penentuan arah kebijakan partai. *Mabda Siyasi* partai menjadi bukti otentik komitmen kebangsaan dalam kerangka pemikiran Islam tradisional. Sementara perilaku politik kader PKB secara umum juga memperlihatkan pembelaan dalam soal-soal itu. Beberapa kalangan mengakui bahwa dalam perjalanannya PKB telah menjelma menjadi sebuah ikon dan simbol partai yang membela pluralisme, demokrasi dan hak-hak minoritas.

Dalam soal menjadikan ideologi sebagai sebuah tuntunan pembuatan kebijakan, bagi beberapa kalangan, PKB termasuk partai yang

berhasil menjalankannya. Dalam perilaku di parlemen Fraksi PKB, misalnya, memperlihatkan konsistensi dalam memperjuangkan ideologi partai. Ali Masykur Musa mengatakan bahkan implementasi ideologi Aswaja dalam nuansa kebangsaan telah masuk dalam ranah perjuangan anggota FPKB dalam mensukseskan anggaran pro-rakyat kecil. Dalam menyikapi kinerja F-PKB, Effendy Ghazali menyatakan bahwa kehadiran PKB sangat diharapkan karena memiliki nilai lebih berupa “konsistensinya terhadap kesatuan bangsa, pluralisme dan nilai-nilai kebangsaan yang merupakan inti dari keindonesiaan”<sup>32</sup>.

Namun demikian dalam konteks internal, nilai-nilai ke-Aswaja-an dan tradisi pesantren belum diturunkan dan diimplementasikan secara komprehensif dan mendetail. Kegiatan-kegiatan kepartaian yang didedikasikan untuk menafsirkan ideologi dalam konteks internal tidak mudah ditemukan dan proporsinya lebih pada persoalan yang bersifat *outward oriented* atau *policy oriented*, ketimbang membangun soliditas identitas kolektif. Hingga satu dekade keberadaannya, tidak mudah mendapatkan sebuah kajian terkait erat dengan upaya mengimplementasikan *shared values* atau ideologi itu dalam soal mengatur kehidupan berpartai, struktur partai dan persoalan pengaturan pola pikir dan perilaku individu. Padahal sudah merupakan tugas partai menjelaskan dan mengimplementasikan nilai-nilai bersama itu dalam makna kepartaian, baik terkait dengan kepentingan organisasi dan penguatan loyalitas kader. Meski PKB berupaya untuk membenahi persoalan itu<sup>33</sup>, dalam prakteknya PKB tidak

<sup>32</sup> Lihat komentar itu dalam Umarudin Masdar (Ed), *Mengabdikan Tiada Henti. Rekam Jejak FKB 2004-2009*, (Yogyakarta: Pustaka Tokoh Bangsa, 2010), hlm. 272.

<sup>33</sup> Lihat misalnya DPP PKB, *Menumbuhkan Kader Bangsa. Investasi Politik Bersama Rakyat. Kosepsi Dasar dan Metodologi Sistem Kaderisasi Partai Kebangkitan Bangsa*, (Jakarta: DPP PKB, 2000); DPP PKB, *Menjadi Politisi Negerawan. Modul Pelatihan dan Orientasi Politik DPC-DPW PKB Modul Orientasi Ideologi DPP PKB*, (Jakarta: DPP PKB, 2000); Mufid A. Busyaeri, *Menggerakkan Roda Partai dan Perubahan Sosial di Tingkat Basis. Modul Pendidikan Dasar Politik Tingkat Anak Cabang Sistem Kaderisasi Partai Kebangkitan Bangsa*, (Jakarta: DPP PKB, 2000); *Menjadi Politisi Organiser Masyarakat. Panduan Pendidikan Kader Basis Partai Kebangkitan Bangsa*, (Jakarta: Lembaga Kaderisasi dan Pendidikan Politik, 2003); Andi Muawayah Ramly (Ed), *Saya Bekerja Maka PKB Menang: Modul*

secara komprehensif menyampaikan materi-materi itu ke seluruh kader di tanah air dan berupaya melakukan standarisasi dan evaluasi secara konsisten dan konsekuen.

Sementara kaderisasi sebagai media sosialisasi *shared values* atau ideologisasi menjadi salah satu fungsinya, lebih difokuskan pada persoalan pemenangan pemilu atau pilkada, atau pada persoalan peningkatan pemahaman kebangsaan dan bagaimana mengimplementasikan hal itu dalam konteks hubungan partai dengan kalangan lain di luar partai (eksternal)<sup>34</sup>. Dan seiring dengan proses kaderisasi yang berjalan lambat dan tersendat-sendat<sup>35</sup>, persoalan ideologisasi internal ini tidak berlangsung secara kontinu dan konsisten. Hal ini dapat dilihat, misalnya, dengan tidak ditemukan jadwal dan pentahapan sistematis yang terkait dengan pemantapan ideologisasi dalam konteks internal dalam partai ini. Begitu pula turunan-turunan ideologis yang mengatur tingkah organisasi dan anggota partai tidak tergarap secara sistematis dan berkesadaran.

Alasan-alasan yang bersifat apologetik seperti sempitnya waktu sosialisasi *shared values* ataupun urgensi mendahulukan kepentingan mempertahankan kekuasaan kerap dikemukakan untuk menjawab mengapa proses ini menjadi demikian tidak terlaksana dengan baik. Waktu kelahiran PKB dengan pemilu pertama di tahun 1999 yang demikian singkat, dianggap sebagai penyebab tidak tuntasnya eksplorasi dan pemantapan ideologi internal partai<sup>36</sup>. Sehingga bergabungnya orang dalam tubuh

*Pelatihan Kader Penggerak Partai untuk Pemenangan Pemilu 2009*, (Jakarta: DPP PKB, 2008); M. Hanif Dakhiri, Eman Hermawan dan Marwan Ja'far. *Workshop Penguatan Sistem dan Manajemen Partai Menyongsong Pemilu 2009*, (Jakarta: DPP PKB, 2007).

<sup>34</sup> Wawancara dengan Andi M. Ramly, Ketua Dewan Tanfidz (2002-2010), Sekretaris Dewan Syuro PKB-Versi Muhaemin (2008-2010) dan Penyusun Tunggal Mabda Syiyasi PKB, di Jakarta 15 Oktober 2010.

<sup>35</sup> Wawancara dengan H.Z. Arifin Junaidi, Sekretaris Dewan Suro DPP PKB (2002-2005) dan Ketua Dewan Syuro DPP PKB (2005-2010), di Jakarta, 28 Oktober 2008.

<sup>36</sup> Wawancara dengan Prof. Dr. Kacung Marijan, Pengamat Politik NU dan Anggota Tim Asistensi Pendirian PKB versi Rembang, di Jakarta 26 November 2010; Wawancara dengan Tohadi Anggota PKB (1996-2005) dan Wakil Ketua PKNU DPP, di Jakarta, 6 Oktober 2010.

partai sebenarnya tidak dilandasi oleh persoalan itu. Sayangnya, selepas Pemilu 1999 partai ini malah terjebak atau lebih menyibukkan diri pada persoalan praktis, baik secara internal berupa perebutan kekuasaan akibat minimnya saluran dan potensi jabatan yang bisa diraih oleh kader di dalam atau di luar partai, namun juga terkait dalam upaya mempertahankan posisi Presiden Gus Dur dari serangan-serangan musuh politiknya<sup>37</sup>.

Persoalan muncul ketika nilai-nilai itu dirasakan tidak kompatibel dengan perkembangan politik yang menuntut hal-hal lain yang bersifat pemenuhan kebutuhan politik. Dalam hal ini “rasionalitas mekanis”, sebagaimana yang diistilahkan oleh Ali Masykur Musa, yang dibutuhkan oleh kader, termasuk kebutuhan material dan persoalan pembagian kekuasaan (*power sharing*), sebagai kompensasi berpolitik, tidak ternaungi dengan baik ataupun memiliki arahan dan diatur dengan seksama oleh ideologi partai<sup>38</sup>. Hal ini memicu penafsiran bebas atas ideologi yang ada dalam melandasi perilaku berpolitik kader. Bagi sebagian kader bahkan telah dipandang dipandang tidak relevan lagi. Ketiadaan tuntunan berperilaku itu, menyebabkan *shared values* yang dimiliki menjadi jauh dari situasi mengikat. *Shared values* tidak mengatur dan menyeragamkan persepsi dan perilaku politik kader manakala berhadapan dengan situasi riil. Khofifah mengatakan manakala berada dalam situasi riil politik, “ideologi itu dimasukkan dalam kantong”<sup>39</sup>.

Sementara itu, infusi *shared values* ini menjadi semakin tersendat dengan penampilan politik PKB yang secara umum masih jauh dari yang diharapkan. Perilaku elit dan politisi PKB yang kerap belum ideal menyebabkan upaya pengembangan nilai-nilai menjadi tidak begitu

diminati. Menurut K.H. Damanhuri, seorang ulama berpengaruh di Depok yang juga pernah menjabat sebagai Ketua Dewan Syura DPD PKB Depok, hal ini disebabkan karena bagi sebagian kalangan tidak ada lagi yang dapat dibanggakan dari PKB. Menurutnya orang NU lebih tertarik untuk mendalami nilai-nilai itu dalam konteks keormasan saja, ketimbang dalam konteks kepartaian<sup>40</sup>. Perkembangan ini memperlihatkan bahwa telah muncul sikap enggan di sebagian kalangan atas kemungkinan dikembangkannya nilai-nilai Aswaja dan tradisi pesantren berikut paham kebangsaan, mengingat partai tidak lagi memberikan tawaran yang meyakinkan bagi para pendukung dan kadernya sendiri.

## 2. Peran Lembaga-Lembaga Formal versus Informal

Dalam melembagakan *shared values* PKB kerap menggunakan lembaga informal di samping lembaga formal, seperti lembaga-lembaga dan *onderbouw* yang ada dalam NU dan juga pada pesantren. Dalam prakteknya semua hal yang terkait dengan ideologisasi nampak diserahkan pada masing-masing individu dan menjadi *taken for granted*, dimana keanggotaan keormasan (terutama NU) dipandang sebagai “bukti” telah berlangsungnya ideologisasi secara internal dalam PKB. Asumsi yang mendasari adalah adanya kesamaan keyakinan di antara kedua organisasi ini secara ideologi dan oleh karenanya dengan sendirinya pembinaan ideologi dalam NU akan dengan cepat “*nyantel*” dalam konteks kepartaian.

Hal yang nampak kurang diantisipasi adalah semangat berormas tidak selalu sejalan dengan semangat kepartaian<sup>41</sup>. Salah satu soal besarnya adalah dalam ormas orientasi kekuasaan itu cenderung minim. Sementara semangat pengabdian kepada masyarakat merupakan fondasi keikutsertaan seseorang di dalamnya,

<sup>37</sup> Hampir semua narasumber menyinggung persoalan ini manakala ditanyakan penyebab lemahnya infusi ideologi dalam PKB.

<sup>38</sup> Wawancara dengan Ali Masykur Musa, Wakil Ketua Umum Dewan Tanfidz PKB (2005-2010) dan Ketua Umum Dewan Tanfidz PKB-Versi Parung (2008-2009), di Jakarta 19 Oktober 2010.

<sup>39</sup> Wawancara dengan Khofifah Indar Parawansa, Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan (1999-2001), Ketua Lembaga Pemenangan Pemilu DPP PKB (2002-2005), di Jakarta, 20 Oktober 2010.

<sup>40</sup> Wawancara dengan K.H. Damanhuri, Ketua Dewan Syuro PKB DPD Depok, Anggota FPKB DPRD Depok (2004-2009), di Depok, 31 Oktober 2010.

<sup>41</sup> Wawancara dengan Zannubah Ariffah Wahid, Sekretaris Jenderal DPP PKB-Gus Dur, di Jakarta, 20 Oktober 2010; Wawancara dengan Khofifah Indar Parawansa, Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan (1999-2001), Ketua Lembaga Pemenangan Pemilu DPP PKB (2002-2005), di Jakarta, 20 Oktober 2010.

yang oleh karenanya pengaturan tingkah laku berpolitik tidak diatur dengan seksama. Sementara berpartai merupakan suatu ajang pelatihan seseorang untuk belajar dan mengaplikasikan ide untuk merebut, mempertahankan dan menjalankan mesin kekuasaan secara elegan dan bermoral, di mana akibatnya pengaturan tingkah laku menjadi penting adanya. Dalam dua dunia yang tidak sama ini, penyerahan begitu saja proses ideologisasi ini kepada pihak lain dapat membawa persoalan pelik.

Pendelegasian pelembagaan *shared values* yang terus terjadi menyebabkan fungsi infusi nilai-nilai itu bersifat cair dan parsial. Sebab dalam prakteknya, infusi ini lebih digerakan oleh patron, dalam hal ini para ulama NU, kepada para santrinya. Sementara kemampuan para patron itu amat terbatas, ditentukan oleh konteks dimana dia tumbuh dan berkembang dan banyak dibimbing oleh pemahaman yang diyakininya akan konteks dan waktu tertentu. Pemahaman akan *shared values* dan proses infusi atasnya dalam upaya mengatur perilaku kader seringkali bersifat garis besar saja, mengingat keikutsertaan mereka dalam dunia politik bukanlah sesuatu yang terbina secara konsisten, berdisiplin dan kontinum secara terus menerus. Di sisi lain, persoalan independensi ulama dan pesantren<sup>42</sup> yang dimilikinya juga menjadi persoalan lain dimana penafsiran *values* itu akhirnya bersifat personal. Masing-masing pihak yang menyatakan diri sebagai orang NU dan PKB merasa diri paham dan berhak untuk menafsirkan nilai-nilai itu berdasarkan pandangannya.

Tidak itu saja, penafsiran-penafsiran yang didelegasikan itu menyebabkan proses ideologisasi, baik internal maupun eksternal, terasa dilakukan demi kepentingan pemeliharaan simbiosis mutualisme di antara kyai dan pihak-pihak yang akan menguntungkannya dan juga sebaliknya. Akibatnya, alih-alih menjadi media penguatan identitas partai, proses ini cenderung menyuburkan penafsiran subyektif yang suatu saat dapat dipergunakan oleh kalangan tertentu demi kepentingan lain di luar partai. Setidaknya, penafsiran subyektif ini berpotensi menutupi

<sup>42</sup> Wawancara dengan Yahya Cholil Staquf, Wakil Sekretaris Jendral PKB (1998-2005) dan Juru Bicara Presiden Abdurrahman Wahid, di Rembang 11 November 2010.

kepentingan partai untuk menciptakan kesatuan pemahaman dan perilaku yang menyeluruh dari para kadernya yang berserakan di seluruh penjuru tanah air.

Di sinilah kemudian parsialitas dan keberagaman menjadi sesuatu yang lumrah terjadi dalam infusi *shared values* di PKB. Intinya infusi itu bersifat “federatif” dimana masing-masing individu memiliki hak untuk menjalankannya dengan kualitas yang tidak sama. Apalagi keberadaan ulama yang memiliki kemampuan menafsirkan ideologi dan menyosialisasikannya secara baik, menurut Khatibul Wiranu, mantan wakil Sekjen PKB, sudah amat jarang dan makin terbatas dengan hengkangnya para ulama berpengaruh pascakonflik Gus Dur dan Alwi di tahun 2005<sup>43</sup>. Dalam situasi ini fenomena PKB sebagai partai federatif, sebagaimana yang dikatakan oleh Yahya C. Staquf, menjadi terpelihara, dan jelas pada akhirnya menyulitkan langkah konsolidasi dan soliditas internal.

Situasi ini menyebabkan “federalisme” penafsiran menjadi mungkin terjadi disamping kemungkinan tidak kokohnya penafsiran ideologi dalam konteks kepartaian mengingat media, kegiatan dan pelaku *value infusion* itu secara riil ada dan dilaksanakan dalam domain nonpartai. Masih berperannya pihak-pihak eksternal dalam konteks riil kehidupan ideologisasi PKB ini menunjukkan lemahnya kemandirian partai dalam mengelola persoalan falsafah dasar partai. Ini merupakan indikasi dari belum kokohnya aspek otonomi partai dalam kesehariannya, yang mengindikasikan belum kokohnya pelembagaan partai ini.

Di sisi lain, situasi ini menjadi semacam paradoks ketika Gus Dur berulang kali, terutama di setengah perjalanan partai, menyatakan untuk menyingkirkan para kyai dalam kehidupan politik yang dianggap bukanlah dunianya. “Serahkan politik pada saya dan biarkan kyai mengurus pesantren” demikianlah pesan implisit yang kerap disampaikannya<sup>44</sup>. Dalam situasi sesungguhnya

<sup>43</sup> Wawancara dengan Khatibul Umam Wiranu, Wakil Sekretaris Jenderal PKB (1999-2005), Anggota FPKB DPR RI (1998-2004), di Depok, 17 Oktober 2010.

<sup>44</sup> Wawancara dengan Khatibul Umam Wiranu, Wakil Sekretaris Jenderal PKB (1999-2005), Anggota FPKB DPR RI (1998-2004), di Depok, 17 Oktober 2010.

Gus Dur tetap membutuhkan peran kyai sebagai penggerak partai di level yang paling bawah, termasuk dalam soal *shared values* yang penting ini. Nampak Gus Dur terlalu percaya bahwa partainya dapat melaksanakan hal itu, meski dalam kenyataan tidaklah selalu demikian.

Di sisi lain, tidak adanya pembinaan para ideolog dalam menafsirkan karena dipandang telah memahami secara *taken for granted*. Hal ini tidak saja akan mengurangi tingkat kesamaan intensitas dan pendalaman pemahaman atas nilai-nilai bersama, khususnya ideologi partai, para kader dalam konteks internal, namun juga dalam pelaksanaannya cenderung memunculkan aparatus ideologi dengan derajat komitmen yang beragam. Tidak adanya bimbingan, dan arahan, apalagi kompensasi yang memadai menyebabkan pelaksanaan infusi nilai-nilai bersama ini dilakukan oleh pihak-pihak atas dasar sukarela tanpa evaluasi dan standarisasi yang memadai.

Dalam pelbagai situasi tersebut dapat terlihat bahwa pada PKB, tidak saja persoalan mengenai *shared values* seperti apa yang akan dikembangkan oleh partai itu sendiri masih belumlah terbangun dengan kokoh, infusi *shared values* sebagai sarana pelembagaan ideologi pun relatif tidak berjalan dengan memuaskan. Pemeliharaan infusi *shared values*, pada akhirnya, sebagaimana implementasinya tidak berjalan dengan komprehensif dan cenderung segementer.

### **Dampak Lemahnya *Shared Values* Kepada Partai**

Dengan tidak berkembangnya infusi *shared values*, PKB tidak saja tidak memiliki parameter dalam menilai prestasi kader, namun pula tidak menjadi acuan bertingkah laku elit dan kader. Terjadilah kemudian semacam “kebebasan relatif” yang diberikan partai bagi para kader untuk menentukan pilihan-pilihan *values* yang dapat dikembangkannya di dalam partai dan menjadikannya tujuan berpartai. Kepatuhan dan ketaatan pada akhirnya lebih ditentukan atas dasar kepatuhan terhadap perorangan atau kepentingan kelompok.

Secara lebih spesifik ada tiga dampak yang muncul dari lemahnya keberadaan *shared values* dalam partai ini yakni, (1) pengelompokan atas dasar pragmatisme, (2) tumbuhnya loyalitas

personal atau *peer group* kepada figur dan bukan partai, yang kemudian disusul atau diimbui oleh (3) gradasi pemahaman dan upaya pelurusan ideologis. Ketiga hal itu pada gilirannya berandil bagi terjadinya fragmentasi dalam PKB.

### **1. Pengkubuan dan Menguatnya “Pragmatisme”**

Ikatan *shared values* yang lemah cenderung dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang berbeda pandangan untuk dapat menarik dukungan pada kader. Adanya “kelonggaran ideologis” menyebabkan pula komunikasi politik pragmatis mudah dikembangkan. Hilangnya batasan-batasan idealisme menyebabkan logika diskusi yang dikembangkan memang demikian praktis dan cenderung menarik karena terkait dengan mengamankan jalur keuntungan politik, baik dalam upaya merebut ataupun mempertahankan, meski secara objektif kerap juga tercampur dengan idealisme untuk menciptakan kondisi yang lebih baik atau mempertahankan hal-hal baik yang dipandang telah ada.

Di sisi lain, berbagai tawaran itu disambut pula oleh kader dengan sudut pandang atau cara berfikir yang sama, yang juga tidak ideologis. Inilah yang pada akhirnya menyebabkan ajakan-ajakan itu mudah diterima. Dan walaupun ajakan atau tawaran itu ditolak, alasan penolakannya pun tetap disadari oleh perhitungan-perhitungan nonideologis.

Fenomena munculnya pengkubuan semacam ini terlihat dari terkonsolidasinya PKB Matori. Dia pun sanggup membentuk kekuatan politik dan melaksanakan Musyawarah Kerja Nasional yang disusul dengan Muktamar Luar Biasa (MLB) di tahun 2002. Kemampuan ini menurut berbagai kalangan sebagai sesuatu yang fantastis untuk ukuran sosok yang dianggap sekadar pion dan bukan siapa-siapa itu. Tidak sekadar berani melawan namun berhasil menunjukkan kepada khalayak bahwa dirinya mampu dan didukung.

Matori mampu membuat kepengurusan lengkap hingga ke beberapa daerah. Matori pun mampu mendekati kelompok-kelompok NU di pelosok daerah dan memanfaatkan jaringan kyai yang berpihak kepadanya untuk mendapatkan restu dan memperoleh lebih banyak lagi dukungan dari para santri. Dampaknya

adalah dalam hitungan bulan Matori telah mampu mengkonsolidasikan kekuatannya di seluruh tanah air. Dan situasi ini membuatnya memiliki *bargaining position* yang diperhitungkan oleh lawan dan belakangan Pemerintahan Megawati.

Beberapa spekulasi mencoba menjelaskan fenomena keberhasilan Matori ini, mulai dari kedekatannya dengan Presiden Megawati, kedudukannya yang strategis sebagai Menhankam, hingga adanya isu politik uang sebagaimana yang diyakini oleh Laode Ida. Namun berbagai spekulasi tersebut ditolak dengan tegas oleh Abdul Khalik Ahmad, orang dekat Matori yang juga sekjen PKB. Menurutnya, keberhasilan konsolidasi itu membuktikan adanya dukungan konkret dari bawah yang digerakkan oleh keprihatinan pengelolaan partai selama ini. Jika pun ada uang yang dibayarkan, menurutnya, itu sekadar pengganti biaya perjalanan<sup>45</sup>. Bahkan atas tuduhan Laode Ida itu pihak PKB-Matori melakukan somasi<sup>46</sup>. Terlepas dari berbagai spekulasi itu kekosongan *shared values*, sekali lagi, memungkinkan terciptanya kesepakatan politik (*political deals*) dan juga dukungan terhadap kalangan yang bertikai dengan amat mudahnya.

**Tabel 1.** Pelaksanaan Muktamar/Muktamar Luar Biasa di PKB (2002-2008)

TEMPAT	WAKTU	PELAKSANA	DPW	DPC
Jakarta	14-16 Januari 2002	PKB-Matori	29	307
Yogyakarta	17-19 Januari 2002	PKB-Gus Dur/Alwi	29	330
Semarang	16-19 April 2005	PKB-Gus Dur/Muhaimin	33	394
Surabaya	1-2 Oktober 2005	PKB-Alwi	31	350
Parung (Bogor)	29 April-1 Mei 2008	PKB-Gus Dur	30	396
Ancol (Jakarta)	2-4 Mei 2008	PKB-Muhaimin	32	429

Sumber: *www.inilah.com*; *www.gatra.com*; Lukman Edy (Ed), *Kronologi Muktamar II PKB: Fakta Historis, Yuridis dan Politis*, (Jakarta: DPP, PKB, 2005), hlm. 20.

Kondisi yang sama terulang kembali pada kasus Muhaimin Iskandar. Jaringan pertemanan segera saja terbentuk dan menguat

<sup>45</sup> Wawancara dengan Abdul Khalik Ahmad, Sekretaris Fraksi PKB DPR RI (1999-2001) dan Sekretaris Jenderal PKB-Versi Matori (2000-2005), di Jakarta, 11 Oktober 2010.

<sup>46</sup> <http://news.liputan6.com/read/26940/pkb-kubu-matori-mensomasi-laode-ida>.

sebagai respons atas pemecatan dirinya oleh Gus Dur. Ini memungkinkan Muhaimin dengan cepat bisa mendapat dukungan dari berbagai pihak dan akhirnya mampu membentuk kepengurusan inti. Keberanian Muhaimin untuk melawan dan beraksi cepat berangkat dari rasa ketidakpuasannya atas mekanisme pemecatan dan situasi internal yang menurut pandangannya telah dimasuki anasir pemecah belah partai. Dengan keyakinan atas situasi yang tidak kondusif di partainya itu segera saja dia mendapat sokongan dari beberapa pengurus daerah. Tidak diduga oleh kelompok Gus Dur, jaring-jaring kelompok Muhaimin mendapat sambutan antusias terutama oleh kader-kader yang dipecat atau mengalami “pendisiplinan sepihak” oleh kelompok Yenny Wahid<sup>47</sup>. Situasi ini terus berkembang dan menggelembung hingga akhirnya melahirkan banyak kepengurusan kembar di daerah. Dan dalam waktu singkat, tidak sampai enam bulan, Muhaimin mampu membentuk kepengurusan lengkap hingga pelosok tanah air.

Beberapa kalangan yang anti-Muhaimin merespon situasi itu dengan menuduh kentalnya nuansa pragmatisme seorang Muhaimin dan kelompoknya. Mereka menganggap Muhaimin dan para pendukungnya sudah tidak sejalan lagi dengan idealisme Gus Dur. Pemecatan Muhaimin dilihat sebagai bentuk ketidaksukaan Gus Dur atas budaya hidup hedonis Muhaimin dan kelompoknya. Sementara sebagian lainnya melihatnya dalam perspektif konspirasi. Menurut mereka Muhaimin ditanam dan didukung oleh kelompok eksternal untuk meredupkan kekuatan Gus Dur yang dianggap terlalu vokal. Menurut mereka tanpa adanya dukungan pihak luar itu Muhaimin tidak akan berani melakukan perlawanan kepada Gus Dur.

Sementara bagi yang mendukung Muhaimin, melihat keberhasilan itu sebagai bentuk kemampuan Muhaimin meyakinkan banyak kalangan untuk bersama-sama membentuk kepengurusan partai yang terbebas dari kepentingan mereka yang ingin berkuasa dengan mengatasnamakan Gus Dur dan kepentingan

<sup>47</sup> Tercatat sebanyak 10 Pengurus Harian DPP PKB, termasuk Muhaimin Iskandar, 14 DPW PKB dan 67 DPC PKB dibekukan setelah Yenny naik menjadi Sekjend. Lihat dalam *Laporan Lengkap Muktamar Luar Biasa Partai Kebangkitan Bangsa, Jakarta 2-4 Mei 2008*, (Jakarta: DPP PKB, 2008).

partai. Terlepas dari berbagai pandangan itu, hal yang nampak jelas terlihat adalah ketiadaan parameter ideologis dan tidak bekerjanya *shared values* dalam soal ini yang memungkinkan friksi itu menjadi terus membesar sehingga pengkubuan pun semakin menguat dan terformalkan.

## 2. Kepentingan Figur di atas Kepentingan Partai

Hal yang juga terjadi adalah terbangunnya komitmen kepada figur dan bukan partai. Dalam hal ini patron, dan bukan masalah ideologis, menjadi elemen penting yang memainkan peran dalam turut menentukan gerak langkah dan keberpihakan kader. Kenyataannya banyak kader yang pada akhirnya lebih melihat siapa sosok atau patron dibalik sebuah kelompok, ketimbang apa yang akan diberikan kelompok ini kepada partai.

Fenomena banyak kader yang akhirnya memilih posisi yang berlawanan dengan Gus Dur dalam beberapa momen friksi internal membuktikan bahwa ada figur kyai lain yang layak atau lebih dihormati untuk diikuti. Meski Gus Dur kerap dipandang *the big patron*, bahkan sebagaimana yang dikatakan oleh K.H Mustofa Bisri, satu dari lima deklarator PKB, sebagai “PKB itu sendiri”<sup>48</sup>, keberadaannya tidak selalu menjamin kepatuhan santri atau kader PKB kepadanya.

Adanya situasi ini mengakibatkan dalam tempo yang tidak berlangsung lama PKB-Alwi atau juga disebut sebagai PKB-Surabaya atau PKB-Ulama dapat segera terbentuk lengkap dengan kepengurusannya di berbagai daerah. MLB-Surabaya yang diselenggarakan sebagai tandingan MLB-Semarang, yang dianggap tidak sah, juga dihadiri oleh pengurus dari berbagai penjuror daerah dan cabang di tanah air. Selain alasan-alasan yang bersifat keabsahan yuridis, kemampuan membentuk PKB-Alwi dalam prakteknya juga amat mengandalkan dan bertumpu pada figur-figur kyai sepuh (*khos*) yang tergabung dalam Kyai Langitan<sup>49</sup>.

<sup>48</sup> Wawancara dengan K.H. A. Mustofa Bisri, satu dari Lima Deklarator PKB, di Rembang, 11 November 2010. Lihat juga Ahmad Mustofa Bisri, *Gus Dur Garis Miring PKB*, (Surabaya: Mata Air Publishing, 2008).

<sup>49</sup> Kamarudin, *Konflik Internal PKB*, (Depok: Akses Publishing, 2008).

Berkerumunnya demikian banyak santri para ulama khos atau Kyai Langitan dalam acara MLB-PKB Ulama di Surabaya, untuk melawan eksistensi Muhaimin dukungan Gus Dur, ataupun belakangan pada saat membentuk PKNU, memperlihatkan bagaimana loyalitas itu ditasbihkan kepada para kyai. Kharisma Kyai Langitan menyebabkan dukungan atas PKB-Alwi mengalir dari berbagai pelosok. Inilah makna “federasi” dalam tubuh PKB sebagaimana yang terasakan dan disebutkan Yahya Staqf itu memperlihatkan wajahnya.

Di sisi lain, kalangan pendukung Gus Dur juga amat bertumpu pada kebesaran nama Gus Dur. Dalam MLB Semarang, yang melegitimasi PKB-Gus Dur-Muhaimin, terlihat sekali nuansa kepentingan memuluskan kehendak sang patron, yang notabene sudah menyatakan diri tidak dapat bekerjasama dengan Syaifullah dan berkehendak untuk melepaskan Alwi dari jabatannya. Bagi sementara kalangan, meski perlu dibuktikan lebih lanjut, dengan berlindung dalam bayang-bayang Gus Dur, kepentingan eksklusif para pembela itu diharapkan dapat terus langgeng.

Berbagai rekayasa dan pelanggaran aturan main saat dilangsungkannya MLB Semarang yang dipandang telah melampaui batas – termasuk di antaranya tidak diperkenalkannya Alwi Shihab sebagai ketua umum beserta beberapa kyai sepuh untuk masuk ke dalam ruang sidang – mencerminkan kepatuhan terhadap sang Patron (Gus Dur). Situasi ini menyebabkan beberapa tokoh partai kecewa dan memilih untuk mengundurkan diri dari pencalonan dan bahkan dari partai, termasuk Prof. Dr. Mahfud MD dan Khofifah Indar Parawansa.

Patronase ini pula yang menjadi penyebab keberhasilan Matori dan Muhaimin mendapatkan dukungan dari para kader dan santri. Keberadaan K.H Dimiyati Rois, seorang tokoh ulama sepuh yang berpengaruh dari Salatiga di Jawa Tengah dan juga sosok K.H Maksud Jauhari<sup>50</sup>, bagi Matori, misalnya, merupakan sumber legitimasi moral yang kuat sekaligus sumber arus dukungan bagi keberadaannya sebagai Ketua Umum

<sup>50</sup> Lihat *Laporan Pertanggungjawaban Ketua Umum DPP PKB Muktamar Luar Biasa Partai Kebangkitan Bangsa, Hotel Borobudur, 14-16 Januari 2002*, (diperbanyak oleh DPW PKB Popinsi Bengkulu).

PKB versinya. Begitu juga beberapa kyai besar seperti K.H Yusuf Chudlori ataupun K.H Abdul Azis Mansyur, dua tokoh kyai besar di Jawa Tengah dan Jawa Timur, menjadi penopang besar bagi legitimasi Muhaimin di mata para santri pengikutnya.

Fenomena di atas memperlihatkan bahwa cara pandang elit dan kader telah dibentuk oleh pola pandang nonideologis sehingga semua impresi yang ada cenderung diterjemahkan sebagai sebuah tawaran-tawaran praktis saja. Kasus fragmentasi dalam tubuh PKB sebenarnya tidak dapat terlepas dari sebuah fenomena mudah terbentuknya pengelompokan atas dasar kepentingan nilai-nilai nonideologis. “Perang Figur” juga memperlihatkan aspek lain dari lemahnya ideologisasi atau penanaman nilai-nilai bersama dalam tubuh partai ini.

### 3. Perbedaan Pemahaman atas Ideologi Partai

Kegagalan infusi nilai-nilai bersama juga berdampak pada munculnya gradasi pemahaman ideologi dan nilai-nilai dalam partai. Sebagaimana yang telah disampaikan bahwa di beberapa daerah sikap dan kebijakan PKB dipertanyakan dengan tanda tanya besar oleh kader-kadernya sendiri. Hal ini mencerminkan bahwa gradasi pemahaman kader yang meski kerap dianggap tidak ada dan dikesampingkan oleh beberapa elit dan kader PKB<sup>51</sup> telah demikian eksis dan sejatinya tidak dapat dikesampingkan.

Para kyai atau ulama yang menyatakan memiliki pandangan berbeda dengan Gus Dur kerap mengaitkan perbedaan itu yakni, (1) masalah pengorganisasian partai yang dipandang tidak mencerminkan semangat demokrasi dan (2) tidak terakomodirnya implementasi ideologi Aswaja dan tradisi pesantren dengan memadai<sup>52</sup>.

<sup>51</sup> Wawancara dengan Andi M. Ramly, Ketua Dewan Tanfidz (2002-2010), Sekretaris Dewan Syuro PKB-Versi Muhaimin (2008-2010) dan Penyusun Tunggal Mabda Syiyasi PKB, di Jakarta 15 Oktober 2010, Ketua Dewan Tanfidz DPW PKB NTB (2002-2005), di Jakarta, 28 Oktober 2010 dan Wawancara dengan Ahmad Shodiq Noor, Sekretaris Jenderal DPW PKB DKI Jakarta, di Jakarta, 3 November 2010.

<sup>52</sup> Wawancara dengan Choirul Anam, Ketua Dewan Tanfidz DPW PKB Jawa Timur (1998-2005) dan Ketua Umum Dewan Tanfidz-PKB versi Alwi (2005) dan Ketua Umum Dewan Tanfidz PKNU, di Jakarta, 13 Oktober 2010; Wawancara dengan Marinah Hardy, Ketua Dewan Tanfidz DPW PKB NTB (2002-

Pada soal pertama, berbagai pemecatan sepihak yang dialami oleh beberapa ketua umum atas prakarsa dan persetujuan segelintir orang menjadi bukti bagaimana fenomena otoritarianisme menggejala dalam partai ini. Atas dasar itu mereka yang berseberangan dengan Gus Dur kerap meminta dan mengkritisi agar personalisasi kekuasaan dalam PB dapat segera diakhiri.

Pada soal kedua, erat kaitannya dengan kritik ideologis terhadap PKB, khususnya kepada Gus Dur. Bagi kalangan yang berseberangan dengan Gus Dur partai dipandang telah jauh melenceng dengan semangat keislaman yang murni Aswaja dengan memberikan porsi terlalu besar terhadap pluralisme yang dalam batas-batas tertentu justru menjadi bumerang bagi umat Islam itu sendiri. Keluhan itu tercermin dari pandangan K.H. Mas Subadar, salah seorang ulama berpengaruh pendukung Gus Dur yang kemudian beralih menjadi pembela Alwi dan pendiri PKNU. Dia mengatakan:

“Ya bagaimana seorang *ahlul shunnah wal jamaah* kok mendukung Ahmadiyah. Orang *ahlul shunnah wal jamaah* senang ke Vatikan... Siapa tidak kecewa kalau ada Rancangan Undang-Undang Anti Porno Grafi dan Porno Aksi (RUU APP) lalu ditolak. Ini *kan* suatu pukulan kepada para kyai yang ingin menjadikan Syari’at Islam berjalan di bumi Indonesia. Tidak membuat negara Islam, tapi berjalan di bumi Indonesia”<sup>53</sup>.

Pluralisme nampak telah menjadi ideologi utama partai, yang sayangnya juga menurut para kyai sepuh telah melampaui batas. Di sisi lain pluralisme itu juga tidak banyak membawa manfaat praktis politik bagi PKB. Sebagaimana yang dikatakan Kamarudin, bahwa salah seorang elit utama PKB-Alwi mengatakan bahwa dalam prakteknya pluralisme yang diperjuangkan oleh Gus Dur tidak membawa manfaat yang signifikan bagi partai. Hal ini dapat terlihat dari pengalaman di suatu daerah non-Muslim, dimana meskipun PKB memiliki kepengurusan lengkap di wilayah itu, namun pada saat pemilihan PKB sama sekali tidak mendapatkan satu pun suara. Pandangan semacam ini jelas sedikit banyak

(2005), di Jakarta, 28 Oktober 2010.

<sup>53</sup> “Para Kyai NU Kecewa dengan Gus Dur”, *Al-Mujtama’*, Edisi 5 Th.1/12 Sya’ban 1429H/14 Agustus 2008.

melupakan kesuksesan PKB di NTT dan Papua terkait dengan spirit pluralisme, namun adanya pandangan semacam ini menunjukkan bagi sementara kalangan internal PKB pluralisme itu tidak memberikan dampak yang signifikan bagi partai, bahkan dalam kacamata “perjuangan keislaman” merugikan.

Selain masalah pluralisme yang melewati batas, para kyai juga merasa bahwa partai di bawah kepemimpinan Gus Dur tidak menyuburkan nilai-nilai kepesantrenan, khususnya penghormatan atas kedudukan ulama. Prilaku Gus Dur yang kerap *nyeleneh* dan bahkan keras kepala menjadi *symtom* (gejala) bagi upaya mengesampingkan saran dan peran ulama dalam dunia politik. Hal ini terlihat, misalnya, dari penolakan Gus Dur atas permohonan ulama sepuh untuk tidak melengserkan Alwi dan Syaifullah. Meski telah diultimatum oleh para ulama agar menanti permintaan mereka, Gus Dur tetap bertahan atas kebijakannya memecat keduanya.

Sementara bagi sebagian kalangan, perilaku Gus Dur itu memperlihatkan sebuah sikap yang dilandasi oleh keyakinan bahwa peran ulama dalam dunia politik memang seharusnya tidak tak terbatas. Pembatasan peran inilah yang coba secara perlahan diwujudkan oleh Gus Dur dalam PKB, yang tentu saja secara ideologis belum dapat diterima secara utuh oleh kebanyakan kyai dan para pengikutnya.

Atas dasar berbagai perbedaan pandangan itulah, para ulama yang disusul dengan politisi dan santri kemudian melakukan resistensi perlawanan terhadap Gus Dur. Perlawanan itu dipermukaan kerap dibungkus dengan persoalan lemahnya penegakan aturan main di PKB. Bentuk perlawanan ideologis itu disampaikan, misalnya, dengan menyebut PKB versi Alwi sebagai “PKB-Ulama”. Refleksi perlawanan terhadap PKB-Gus Dur itu kemudian tercermin pula dalam PKNU yang secara ideologis menyatakan dengan tegas tujuannya yakni, untuk melindungi kepentingan Islam Aswaja dan memelihara tradisi pesantren dalam kehidupan politik, termasuk penghormatan yang tinggi terhadap kyai.

Berbagai situasi di atas memperlihatkan belum totalnya pemahaman atas *shared values* dalam tubuh PKB, yang pada akhirnya menyebabkan fragmentasi menjadi mudah

terjadi. Tidak saja karena para kyai itulah yang pada akhirnya memiliki otoritas yang kemudian menyebabkan dual-loyalitas, namun pula karena memang tidak adanya kesepahaman atas nilai-nilai bersama di sebagian besar kalangan. Dan karena ikatan yang ada tidak didasari oleh nilai-nilai bersama melainkan pada keberadaan “patron yang berkerumun”, maka manakala para patron itu merasa tersinggung keyakinan dan pandangan politiknya, yang memicu mereka untuk melakukan perlawanan, fragmentasi menjadi sesuatu yang tidak terelakan.

## Penutup

Pembahasan di atas memperlihatkan bahwa PKB sebenarnya telah memiliki potensi *shared values* yang dapat dijadikan sebuah pengikat yang kuat. Namun, terdapat persoalan dalam nilai-nilai itu sendiri yang meliputi substansi dan aplikasi. Dari sisi substansi, muncul sebuah relativisme yang menyulitkan penciptakan *distinctive values* bagi partai ini dengan partai-partai yang berlatar belakang NU lainnya. Sementara dari sisi aplikasi, nilai-nilai yang bekerja pada level keormasan (*civil society*), yakni NU, tidak dapat dengan mudah ditransformasikan pada level partai (*political society*).

Dalam perkembangannya, setidaknya hingga dalam satu dekade awal keberadaannya, PKB juga memiliki persoalan dalam melakukan infusi atas potensi *shared values* itu. Fokus kerja partai pada level eksternal, terutama dalam pemerintahan, ketimbang pembenahan dan penguatan *shared values* menyebabkan kerja-kerja infusi menjadi terbengkalai. Situasi ini diperburuk dengan kenyataan bahwa proses infusi itu tidak tertangani secara langsung oleh partai sehingga tidak memiliki standar yang memadai baik dalam soal materi dan pengelolaan. Proses infusi pada akhirnya dilakukan oleh banyak “broker ideologi” yang tidak terkontrol.

Fenomena “federasi”, sebagaimana yang dikatakan oleh Staquf, atau “negara dalam negara” pun terjadi. Dalam situasi ini, terjadilah perbedaan penafsiran atas nilai dan *code of conduct* yang ada dalam partai. Muncul kemudian kebebasan menafsirkan apa yang dianggap layak dan tepat bagi partai. Penafsiran itu kerap bersifat subyektif, berdasarkan interpretasi dan kepentingan elite atau

patron. Akibatnya, muncul multiloyalitas dan sikap menomorduakan *shared values*, yang telah ditafsirkan secara multiinterpretasi itu.

Dengan berbagai kecenderungan itu PKB menjadi berkembang menjadi sebuah partai tanpa pelembagaan nilai-nilai, yang menyebabkan soliditas internal menjadi cair dan situasi yang terbangun menjadi pragmatis. Tidak adanya semangat kebersamaan, sebagai dampak logis dari ketiadaan infusi nilai-nilai bersama, menyebabkan pada akhirnya soliditas partai mudah tergerus. Akibatnya, konflik mudah sekali tumbuh berkembang dan memiliki kecenderungan untuk tidak mudah terselesaikan.

Semua kasus fragmentasi yang dihadapi oleh PKB memang dipicu oleh kesalahan prosedur, namun konflik itu sendiri tidak harus memicu fragmentasi jika dia tidak hadir dalam ranah partai yang memiliki *shared values* kuat. Artinya, fragmentasi itu, sekali lagi mungkin dapat dihindari sejak dini jika partai dapat mengembangkan *shared values* dan menginternalisasikannya secara sungguh-sungguh kepada organisasi maupun kader.

Keberadaan *shared values* memunculkan rasa hormat atas cita-cita ideal partai, ketimbang kepentingan terbatas kelompok atau figur tertentu dan cita-cita parsial yang mengiringinya. Keberadaannya juga dapat membawa partai sebagai sebuah alat ideologi (*ideological tools*), yang dapat membawa rasa bangga dan memiliki di antara para kader. Sementara dalam konteks kader, adanya infusi nilai-nilai bersama setidaknya kader memiliki pandangan yang solid, utuh, dan obyektif dengan sebuah parameter nilai yang jelas. Sayangnya, hal itu tidak juga mewujudkan dalam PKB setidaknya selama satu dekade keberadaannya.

## Daftar Pustaka

### Buku

- Anam, Choirul. 2010. *Pertumbuhan dan Perkembangan NU*. Surabaya: Duta Aksara Mulia.
- Barton, Greg. 1999. *Gagasan Islam Liberal di Indonesia. Pemikiran Neo-Modernisme Nurcholis Madjid, Djohan Effendi, Ahmad*

Wahib dan Abdurrahman Wahid. Jakarta: Paramadina.

- Bisri, Ahmad Mustofa. 2008. *Gus Dur Garis Miring PKB*. Surabaya: Mata Air Publishing.
- Busyaeri, Mufid A. 2000. *Menggerakkan Roda Partai dan Perubahan Sosial di Tingkat Basis. Modul Pendidikan Dasar Politik Tingkat Anak Cabang Sistem Kaderisasi Partai Kebangkitan Bangsa*. Jakarta: DPP PKB.
- Lembaga Kaderisasi dan Pendidikan Politik. 2003. *Menjadi Politisi Organiser Masyarakat. Panduan Pendidikan Kader Basis Partai Kebangkitan Bangsa*. Jakarta: Lembaga Kaderisasi dan Pendidikan Politik.
- Choirie, A. Effendy. 2008. *Islam-Nasionalisme UMNO-PKB Studi Komparasi dan Diplomasi*. Jakarta: Pensil-234.
- Choirie, A. Effendy. 2002. *PKB Politik Jalan Tengah NU*. Jakarta: Pustaka Ciganjur.
- Wahid, Yenny Zannuba, A. Effendy Choirie, M. Kholid Syeirazi (Eds). 2007. *9 Tahun PKB Kritik dan Harapan*. Jakarta: Panitia Nasional Harlah Ke-9 PKB.
- Dakhiri, M. Hanif, Eman Hermawan dan Marwan Ja'far. 2007. *Workshop Penguatan Sistem dan Manajemen Partai Menyongsong Pemilu 2009*. Jakarta: DPP PKB.
- Dhofier, Zamakhsyari. 1982. *Tradisi Pesantren: Studi Tentang Pandangan Hidup Kyai*. Jakarta: LP3ES, 1982.
- Duverger, M. 1964. *Political Parties: Their Organisation and Activity in the Modern State*. London: Methuen.
- Edy, Lukman (Ed). 2005. *Kronologi Mukhtamar II PKB: Fakta Historis, Yuridis dan Politis*. Jakarta: DPP, PKB.
- Fatah, Munawir Abdul. 2008. *Tradisi Orang-Orang NU*. Yogyakarta: Pustaka Pesantren.
- Fealy, Greg. 2003. *Ijtihad Politik Ulama. Sejarah NU 1952-1967*. Yogyakarta: LKiS.
- Huntington, Samuel P. 1968. *Political Order in Changing Society*. New Haven: Yale University Press.
- Irsyam, Mahrus. 1984. *Ulama dan Partai Politik. Upaya Mengatasi Krisis*. Jakarta: Yayasan Perkhidmatan.
- Ismail, Dr. Faisal. 1999. "Pilihan Politik Kiai dan Daya Kritis Jamaah NU", dalam *NU, Gusdurisme dan Politik Kiai*. Yogyakarta: Tiara Wacana Yogyakarta.
- Janda, Kenneth. 1980. *Political Parties: A Cross National Survey*. (New York: The Free Press.

- Kacung, Marijan. 1992. *Quo Vadis NU. NU setelah Khittah 1926*. Surabaya: Penerbit Erlangga.
- Kamarudin. 2008. *Konflik Internal PKB*. Depok: Akses Publishing.
- Mahendra, Yusril Ihza. 1999. *Modernisme dan Fundamentalisme dalam Politik Islam, Perbandingan Partai Masyumi (Indonesia) dan Partai Jamaat-i-Islami (Pakistan)*. Jakarta: Paramadina.
- Masdar, Umarudin (Ed). 2010. *Mengabdi Tiada Henti. Rekam Jejak FKB 2004-2009*. Yogyakarta: Pustaka Tokoh Bangsa.
- McGuire, James W. 1997. *Peronism without Peron. Unions, Parties and Democracy in Argentina*. Stanford: Stanford University Press.
- DPP PKB. 2000. *Menjadi Politisi Negarawan. Modul Pelatihan dan Orientasi Politik DPC-DPW PKB Modul Orientasi Ideologi DPP PKB*. Jakarta: DPP PKB.
- DPP PKB. 2000. *Menumbuhkan Kader Bangsa. Investasi Politik Bersama Rakyat. Kosepsi Dasar dan Metodologi Sistem Kaderisasi Partai Kebangkitan Bangsa*. Jakarta: DPP PKB, 2000.
- Michels, Robert. 1966. *Political Parties: A Sociological Study of the Oligarchical Tendencies of Modern Democracy*. New York: The Free Press.
- Musa, Ali Masykur. 2010. "Politik NU dan Pragmatisme Parpol", dalam Khamami Zada dan A. Fawaid Sjadzili. *Nahdlatul Ulama, Dinamika Ideologi dan Politik Kenegaraan*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Panebianco, Angelo. 1988. *Political Parties: Organization and Power*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Ramly, Andi Muawaiyah (Ed). 2008. *Saya Bekerja Maka PKB Menang: Modul Pelatihan Kader Penggerak Partai untuk Pemenangan Pemilu 2009*. Jakarta: DPP PKB.
- Sitompul, Eimar Martahan. 2010. *NU dan Pancasila*. Yogyakarta: LKiS.
- Thoyfoer, HA. 2010. *Politik Kebangsaan NU: Tafsir Khittah Nahdlatul Ulama 1926*. Yogyakarta: Mutiara.

## Jurnal

- Levitsky, Steven. 1998. "Institutionalisation and Peronism: the Case, the Concept and Case for Unpacking the Concept". *Party Politics* 4(1).
- Randall, Vicky dan Lars Svasand. "Party Institutionalization in New Democracies". *Party Politics*, Vol. 8 January/1/2002.

## Laporan dan Makalah

- Basedau, Mathias dan Alexander Stroh. 2008. "Measuring Party Institutionalization in Developing Countries: A New Research Instrument Applied to 28 African Political Parties". *GIGA Working Papers*. Hamburg: GIGA Research Program.
- DPP PKB. 2008. *Laporan Lengkap Muktamar Luar Biasa Partai Kebangkitan Bangsa*. Jakarta, 2-4 Mei 2008. Jakarta: DPP PKB.
- DPP PKB. 2002. *Laporan Pertanggungjawaban Ketua Umum DPP PKB Muktamar Luar Biasa Partai Kebangkitan Bangsa*. Jakarta, 14-16 Januari 2002, (diperbanyak oleh DPW PKB Popinsi Bengkulu).
- Wawancara dengan Abdul Khalik Ahmad, Sekretaris Faksi PKB di DPR RI (1999-2001) dan Sekretaris Jenderal PKB-Matori (2000-2005), di Jakarta, 11 Oktober 2010.
- Wawancara dengan Ahmad Shodiq Noor, Sekretaris Jenderal DPW PKB DKI Jakarta, di Jakarta, 3 November 2010.
- Wawancara dengan Dr. Ali Masykur Musa, Wakil Ketua Dewan Tanfidz PKB (2005-2010) dan Ketua Umum Dewan Tanfidz PKB-Parung (2008-2009), di Jakarta, 19 Oktober 2010.
- Wawancara dengan Anas Nashikin, Sekretaris Jenderal Garda Bangsa, di Jakarta, 26 Oktober 2010.
- Wawancara dengan Andi M. Ramly, Ketua Dewan Tanfidz (2002-2010), Sekretaris Dewan Syuro PKB – Muhaimin (2008-2010) dan penulis "Mabda Syiyasi PKB," di Jakarta, 15 Oktober 2010.
- Wawancara dengan Choirul Anam, Ketua Dewan Tanfidz DPW PKB Jawa Timur (1998-2005) dan Ketua Umum Dewan Tanfidz PKB-Alwi (2005-2007), di Jakarta, 13 Oktober 2010.
- Wawancara dengan Dr. Kamarudin, Pengamat Partai Politik Islam, Dosen di Departemen Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia di Depok, 7 Oktober 2010.
- Wawancara dengan H.Z. Arifin Junaidi, Sekretaris Jenderal Dewan Syuro PKB (2002-2005) dan Ketua Dewan Syuro PKB (2005-2010), di Jakarta, 28 Oktober 2010.
- Wawancara dengan Khofifah Indar Parawansa, Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan (1999-2001), Ketua Lembaga Pemenangan Pemilu PKB (2002-2005), di Jakarta, 20 Oktober 2010.

Wawancara dengan Marinah Hardy, Ketua Dewan Tanfidz DPW PKB Nusa Tenggara Barat (2010-2015), di Jakarta, 15 Oktober 2010.

Wawancara dengan Prof. Dr. Kacung Marijan, Pengamat NU dan Anggota Tim Asistensi Rencana Pembentukan PKB (versi Rembang), di Jakarta, 26 November 2010.

Wawancara dengan Zannuba Arifah “Yenny” Wahid, Sekretaris Jenderal Dewan Tanfidz PKB-Wahid (2008-2010), di Jakarta, 20 Oktober 2010.

Wawancara dengan Tohadi, Anggota PKB (1996-2005) dan Wakil Ketua PKNU DPP, di Jakarta, 6 Oktober 2010.

Wawancara dengan Khatibul Umam Wiranu, Wakil Sekretaris Jenderal PKB (1999-2005), dan

Anggota DPR (1998-2004), di Depok, 17 Oktober 2010.

Wawancara dengan A. Mustafa Bisri, Salah Satu Pendiri PKB, di Rembang, 11 November 2010.

### **Surat Kabar dan Website**

Zada, Khamami. “NU, Politik dan Khidmat Umat“. *Kompas*. 15 Desember 2006.

“Para Kyai NU Kecewa dengan Gus Dur“. *Al-Mujtama’*. Edisi 5 Th.I/12 Sya’ban 1429H/14 Agustus 2008.